

USAHA-USAHA PENGGAGALAN PEMILIHAN UMUM PERTAMA TAHUN 1955**WINDA RIZKY NUR LUTFIANA**

Jurusan Pendidikan Sejarah
 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
 Universitas Negeri Surabaya
 E-mail: winda.rizky26@gmail.com

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
 Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum pertama kali Indonesia sebagai bentuk cerminan Negara Demokrasi. Keinginan atau rencana untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebenarnya sudah lama, hampir bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia agar terciptanya Negara demokratis. Pada perkembangannya situasi politik Indonesia mengalami berbagai kendala dalam menyelenggarakan pemilihan umum sehingga dalam rencana penyelenggaraannya sampai berganti sebanyak tiga kabinet. Pergantian kabinet menimbulkan muncul beberapa oknum atau gerombolan yang berniat untuk menggagalkan pemilihan umum yang tidak sepakat dengan jalan pelaksanaan pemilihan umum. Permasalahan ini dipicu dari segi perangkat UU yang belum siap, dan segi keamanan yang belum stabil.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana motif usaha-usaha menggagalkan pemilihan umum pertama tahun 1955? (2) Bagaimana jalannya upaya kegagalan pemilihan umum pertama tahun 1955? (3) Bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi adanya usaha-usaha kegagalan pemilihan umum pertama tahun 1955?. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah untuk mengungkap permasalahan yang diteliti yang meliputi metode heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah guna kepentingan bersama. Pada pemilihan umum 1955 diikuti oleh partai-partai politik yang membuat semakin panasnya pertikaian yang terjadi diantara partai-partai politik yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Situasi keamanan yang tidak stabil pada saat menjelang pemilihan umum disebabkan oleh pergolakan yang dilakukan oleh oknum-oknum gerombolan di beberapa daerah. Pergolakan tersebut dilakukan untuk menggagalkan jalannya pemilihan umum 1955 yang dilakukan dengan segala cara.

Bentuk-bentuk usaha kegagalan pemilihan umum 1955 yang dilakukan dengan bentuk kecurangan seperti melakukan aksi anarkis membakar TPS, melakukan pembunuhan kepada anggota panitia menjelang pemilihan umum. Kecurangan tersebut dilakukan saat kampanye maupun pada saat hari pemungutan suara oleh orang-orang yang berkepentingan. Adanya upaya kegagalan pemilihan umum menyebabkan munculnya reaksi dari pemerintah dan masyarakat yang mana perlu dilakukan pemberantasan bagi oknum yang ingin menggagalkan pemilihan umum. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum 1955 mampu terselenggara namun dalam penyelenggaraannya masih banyak catatan merah akibat dari adanya intimidasi dan meracuni otak calon pemilih agar tidak datang ke tempat lokasi pemungutan suara dan menggagalkan pemilihan umum 1955.

Kata Kunci : Usaha, Penggagalan, Pemilihan Umum 1955.

Abstract

General election in 1955 was the first general election in Indonesia as a reflection of democracy state. The urge or planning to run general election was actually long time ago, it almost together with the Indonesia independent suppose to create democracy state. In the development, the situation of politic in Indonesia had different constraints in general election so in the plan of the implementation, it changed as much as three cabinets. The substitution of cabinets raised some elements or group which intends to fail the general election. These problem is caused from the not ready of device act and the unstable of security.

The problem of this study is (1) How is motive of struggle to make failed in general election in 1955? (2) How the discomfiture attemps in first general election in 1955? (3) How community and government response toward it?. The method which is used by writer is method history research to reveal the problems includes heuristic problem, critic, interpretation and histography.

The result of this study show that the general election in 1955 was organized by government for the benefit of common. The general election in 1955 followed by political parties which made the heat of contention happens among

political parties which influence in society. The unstable of security in general election was caused by rogue elements to upheaval the general election in 1955.

Bussines forms derail the 1955 elections done by a form of cheating such anarchist action by burning the TPS (voting places), murder of the committe before the general elections. Cheating forms was made during the campaign and on the voting day. Their effort to thwart the elections lead a reaction from the government and society, which needs to be done to actors who want to derail the general elections. It can be conclude that the general elections 1955 can be held, However in its implementation there is a red record result of intimidation and poisoning the minds of voters. So they not to come to the polls and derail the 1955 elections.

Keywords : *Efforts, Derail, Elections of 1955*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah mekanisme politik yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung.¹ Pemilihan umum tahun 1955 menjadi tolak ukur kekuatan-kekuatan partai politik dalam pesta demokrasi.

Keinginan untuk mengadakan pemilihan umum, sudah menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada UUD 1945, di dalam ternyata tidak merumuskan secara tegas tentang pemilihan umum, namun bila diamati lebih teliti dan mendasar uraian dalam pembukaan UUD 1945, serta pasal-pasalnya secara tidak langsung menjelaskan tentang pemilihan umum.²

Perkembangan situasi politik Negara Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Terbentuknya KNIP tidak lepas atas dikeluarkannya Maklumat Politik pada 3 November 1945 oleh wakil Presiden Republik Indonesia oleh Moh. Hatta. Maklumat tersebut menganjurkan untuk mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat di seluruh tanah air. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem pemerintahan.

Pemerintahan Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan umum 1955, muncul banyak konflik ideologi

dan konflik internal partai yang menjadikan kabinet atau parlemen yang dikuasai partai-partai menjadi tampak melemah dengan kondisi jatuh bangunnya kabinet Parlementer. Adanya perbedaan pandangan dan munculnya konflik-konflik yang ada, menjadikan pemilu 1955 muncul masalah dari segi persiapan pelaksanaan pemilu yang dianggap kurang matang. Sikap ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan sebelumnya untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan Negara serta serbuan kekuatan asing yang mengharuskan Negara ini terlibat peperangan.³

Situasi ketikstabilan pada pemilu 1955 diwarnai konflik antar aliran politik karena adanya perbedaan ideologis-kultural. Konflik-konflik tersebut seringkali dapat didamaikan melalui mekanisme solidaritas di kalangan elite partai. Namun konflik antar partai tersebut semakin berkepanjangan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemilu 1955 sebenarnya diwarnai permasalahan yang menjadikan maraknya konflik-konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini penulis menduga ada oknum-oknum yang ingin menunda pemilihan umum dan berniat menggagalkan pemilihan umum 1955. Usaha untuk melakukan penundaan pemilihan umum menjadi kenyataan dengan alasan tidak dapat dilakukan serentak pada tanggal 29 September 1955 seperti yang dijadwalkan.

Berdasarkan rencana yang dilakukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), ternyata kabinet Burhanudin Harahap mencoba untuk mengulur-ulur waktu dan menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu 1955. Mengenai keamanan sudah diketahui PPI dan sudah diketahui oleh pemerintah. Adanya gangguan-gangguan dari oknum atau gerombolan pengacau adalah sengaja dibantu atau memang

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1950-1965)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1966), hlm. 41.

² Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, hal ini dipertegas dengan lagi dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

³ Faisal Siagian, *Partai Politik Pasca Orde Baru*, (Jakarta : LP3ES, 2002), hlm. 108.

didorong oleh kaum penjajah, kaum demokrasi dan anti pemilihan umum.⁴ Sebenarnya pada masa itu negeri ini mendambakan keadaan Indonesia yang tentram, dapay melakukan pembangunan secara baik. Tumpuan harapan ini sebenarnya dipercayakan kepada Konstituante hasil pemilihan umum 1955. Tetapi pada kenyataannya Konstituante tidak dapat memenuhi harapan rakyat waktu itu. Sehingga usaha kegagalan pemilu terlong menjadi racun bagi bangsa Indonesia yang pada umumnya menginginkan pesra demokrasi tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Melihat betapa pentingnya pemilihan umum 1955 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan ketertarikan penulis untuk membahas masalah usaha kegagalan pemilu 1955. Oleh karena itu penulis akan memahami dan mengerti terlebih dahulu latar belakang adanya usaha-usaha kegagalan pemilihan umum 1955.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas mengenai usaha-usaha kegagalan pemilihan umum 1955. Penelitian ini difokuskan motif usaha kegagalan pemilu 1955 yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan berbagai alasan hingga memunculkan reaksi pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Kajian Pustaka

Beberapa penulis yang telah membahas mengenai tema pemilu 1955 dan sebagai referensi penulisan ini adalah :

M. Rusli Karim dengan judul *“Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang-Surut”*⁵ berisi mengenai gambaran profil partai politik yang ikut bersaing dalam pemilu 1955, serta mengelompokkan partai politik tersebut berdasarkan paham dan ideologi yang dianut. Pada tulisan M. Rusli Karim menggambarkan ciri khas masing-masing partai, sehingga dapat mempermudah pemahaman dan pengidentifikasian tiap-tiap partai politik.

C.S.T. Kansil⁶ dengan bukunya yang berjudul *“Inti Pengetahuan Pemilihan Umum”* berisi mengenai asas dalam pemilihan umum yang mana secara langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati

nuraninya, tanpa melalui perantara. Buku ini menjelaskan mengenai partisipasi politik masyarakat yang berkaitan erat dengan demokrasi suatu Negara, yang mana dalam Negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan dalam ranah perpolitikan Indonesia.

Dr. Muchamad Ali Safa’at., M. H. dengan buku yang berjudul *“Pembubaran Partai Politik”* berisi mengenai pembubaran partai politik dalam pandangan konstitusi terutama di Indonesia. Pada karyanya dijelaskan secara terperinci mengenai sejarah pembubaran partai politik di Indonesia, mulai dari masa orde lama hingga orde baru.

Helbert Feith dengan buku yang berjudul *“Pemilihan Umum 1955 Indonesia”* berisi mengenai partai-partai politik yang memiliki kekuatan dalam pemilihan umum 1955 dan menjelaskan distrik pemilihan umum. Buku ini juga membahas mengenai partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum 1955 yang merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi yang pertama di Indonesia serta menjelaskan proses dan sistem politik yang berjalan di Indonesia. Pada masalah usaha-usaha kegagalan pemilihan umum 1955 dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi saat pemilihan umum adalah menggunakan teori kerusuhan massa. Menurut teori N.J. Smelser mengenai teori kerusuhan massa yang mana dalam bukunya mengenai terjadinya kekerasan massa. Jika dikaitkan dengan permasalahan usaha kegagalan pemilihan umum, sebagai indikatornya N.J. Smelser memiliki tahapan yang memungkinkan untuk menyertai munculnya kekerasan.

Adapun indikator menurut teori N.J. Smelser ini memiliki beberapa tahap yang menimbulkan kekerasan, diantaranya: 1) Situasi sosial, yang menimbulkan kekerasan akibat, struktur sosial 2) Kejengkelan atau tekanan sosial, 3) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran, 4) Mobilisasi massa untuk beraksi, yakni adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasi diri mereka untuk bertindak, 5) Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan.⁷

Pada teori Smelser ini jika dikaitkan dengan permasalahan pemilihan umum 1955 adalah adanya

⁴ *Berita Indonesia*, 6 September 1955.

⁵ Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah potret pasang-surut*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983).

⁶ C.S.T. Kansil (b), *Inti pengetahuan Pemilihan Umum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974).

⁷ Sihbudi Riza dan Moch Nurhasim Ed, *Kerusuhan Sosial di Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm. 56.

kekerasan yang ditimbulkan dari situasi sosial akibat struktur sosial yang terjadi di masyarakat. Struktur sosial tersebut adalah dari golongan yang tidak sepakat dengan diadakannya pemilihan umum yang pertama. Misalnya, golongan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan yang merasa jengkel dengan pemerintah Indonesia akibat tidak sesuai dengan yang diinginkan golongan tersebut.

Golongan yang ingin menggagalkan pemilihan umum telah menanamkan kebencian terhadap pemerintahan yang akan melaksanakan pemilihan umum, sehingga kelompok yang tidak suka ini melakukan aksinya dengan jalan melakukan kerusuhan di daerah selama pemilihan umum. Jadi, usaha penggagalan pemilihan umum yang dilakukan akibat dari keinginan kelompok tertentu untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kerusuhan massa yang terjadi selama pemilihan umum ini dilakukan dengan adanya tindakan yang nyata untuk merusak jalannya pemilihan umum 1955, misalnya mereka melakukan aksi penculikan dan pembunuhan kepada para aparat dan panitia selama pemilihan umum.

Aksi kerusuhan tersebut tentunya menimbulkan reaksi dari pemerintah untuk melakukan kontrol sosial yakni melakukan keamanan dan pemantauan selama jalannya pemilihan umum 1955 agar dapat mengendalikan situasi yang terjadi selama kerusuhan pemilihan umum.

Walaupun pemilihan tersebut terlaksana, namun di beberapa daerah tidak dapat melakukannya secara serentak. Dengan demikian, berdasarkan teori dari kerusuhan massa, dapat ditandai dengan banyaknya pertikaian yang terjadi di beberapa daerah yakni terjadinya kerusuhan yang terjadi selama pemilihan umum dari selama persiapan pemilihan umum, kampanye, pelaksanaan pemilihan, hingga setelah pemilihan umum.

Ada beberapa karya yang membantu dalam penelitian ini adalah kajian jurnal yang membahas mengenai pemilihan umum 1955 adalah jurnal yang berjudul "Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955"⁸ karya Baskara T. Wardana. Pada karyanya menjelaskan seluk beluk yang terjadi pada pemilihan umum 1955. Adapun perbedaan yang akan penulis buat adalah terletak pada situasi dan kondisi adanya usaha-usaha dari oknum-oknum tertentu yang berniat melakukan penggagalan pemilihan

umum pertama tahun 1955 yang belum dibahas oleh peneliti lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Terdapat empat tahap yang harus dilakukan, yaitu :

Heuristik

Pada tahap awal yang dilakukan adalah heuristik, yaitu pencarian sumber sejarah baik primer maupun sekunder. Terdapat dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arsip Sekretaris Negara KPM 1950-1959 mengenai penjagaan dan pengawalan selama pemilihan umum 1955.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar yang sejaman dan buku-buku yang di dapat merupakan sumber sekunder. Sumber dari surat kabar yang diperoleh dari PNRI terdiri dari surat kabar *Berita Indonesia, Indonesia Raya, Pikiran Rakyat, Harian Rakyat, Sinpo, Merdeka dan Mestika*.

Disamping itu penulis melakukan pencarian sumber di Perpustakaan Pusat UNESA, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung dengan harapan mencari referensi dari buku-buku yang membahas tentang pemilihan umum 1955.

Kritik Sumber

Tahap kedua adalah kritik, pada tahap ini peneliti setelah mengumpulkan sumber maka melakukan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan guna memperoleh fakta-fakta sejarah yang berkenaan dengan dua aspek yakni yakni kritik ekstern dan intern. Kritik sumber dilakukan dengan melalui proses pembacaan sumber tertulis yang telah ditemukan. Pada kritik ekstern, peneliti berusaha mencari keaslian atau keoriginalan suatu sumber dari segi luarnya. Kemudian pada kritik intern, peneliti berusaha mencari keaslian sumber dari segi isinya.

Dari sumber-sumber yang diperoleh, peneliti melakukan penilaian tentang keaslian sumber yang diperoleh dengan cara jenis huruf, hasil cetakan, usia kertas dan lain sebagainya. Upaya membandingkan segi isi data peneliti membandingkan data satu dengan data yang lain dengan harapan dapat menjadi penguat kebenarannya.

⁸ Baskara T. Wardana. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004. Yogyakarta. (Online). Diakses tanggal 20 Mei 2016.

Sumber yang didapatkan terdapat pada beberapa surat kabar seperti *Berita Indonesia*, *Indonesia Raya*, *Mestika*, *Sinpo*, *Harian Rakyat*, *Pikiran Rakyat*, yang telah membawa pembaca terbawa suasana yang mencerminkan keadaan pada situasi pemilihan umum 1955 yang dilakukan di Indonesia untuk pertama kalinya.

Interpretasi Sumber

Tahap ketiga adalah interpretasi, tahap ini peneliti telah mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang ditemukan diberbagai sumber, baik primer maupun sekunder dengan melalui tahap kritik baik intern dan dari fakta-fakta sejarah. Dengan mengkaitkan masing-masing sumber maka peneliti agar dapat ditafsirkan dengan cara mengkonstruksi dengan memiliki koherensi dan sebab akibat. Dalam melakukan interpretasi hal yang perlu dilakukan adalah mencari hubungan antara fakta secara koheren untuk mencari kebenarannya berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder yang sudah diperoleh.

Historiografi

Tahap yang terakhir adalah historiografi penulisan sejarah yang mana peneliti membuat tulisan sejarah yang berjudul "*Usaha-Usaha Penggagalan Pemilu Pertama Tahun 1955*" dari sumber-sumber yang telah ditafsirkan dan ditulis berdasarkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu: (1) bagaimana motif usaha-usaha menggagalkan pemilihan umum pertama tahun 1955, (2) bagaimana jalannya upaya kegagalan pemilihan umum pertama tahun 1955, (3) bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi adanya usaha-usaha kegagalan pemilihan umum pertama tahun 1955. Adapun pembahasan hasil penelitian sebagai berikut ini:

A. Motif Usaha-Usaha Menggagalkan Pemilihan Umum 1955

Berikut ini Motif Usaha-Usaha Menggagalkan Pemilihan Umum 1955 :

1. Kondisi Politik Indonesia : Masa Sebelum 1955

Pada sistem pemerintahan Indonesia pada masa parlementer banyak mengalami kendala-kendala yang berdampak pada program-program kerja kabinet. Pada masa demokrasi parlementer telah dilaksanakan tujuh kabinet dengan masa jabatan yang berbeda. Kabinet tersebut antara lain adalah kabinet Natsir dengan masa

jabatan 6 September 1950-18 April 1951, kabinet Sukiman dengan masa jabatan 26 April 1951-26 April 1952, kabinet Wilopo dengan masa jabatan 19 Maret 1952-2 Juni 1953, kabinet Ali Sastroamijoyo I dengan masa jabatan 31 Juli 1953-24 Juli 1955, kabinet Burhanudin Harahap dengan masa jabatan 12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956, kabinet Ali Sastroamijoyo II dengan masa jabatan 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957, dan kabinet Juanda dengan masa jabatan 9 April 1957-10 Juli 1959.⁹

Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer memiliki kiprah perpolitikan yang carut marut. Hal ini nampak ketika kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh program-programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik yang ditambah lagi dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk memisahkan diri dari NKRI.

Pemberontakan-pemberontakan terjadi menjelang pemilihan umum salah satunya adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Gerakan ini ingin mendapatkan hati dan simpati dari rakyat yang akan membawa masyarakat Indonesia ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan adanya Angkatan Perang ini dapat dikatakan sebagai kekuatan bersenjata sebagai pemecah belah yang didalangi oleh pihak Belanda.¹⁰ Pemberontakan tersebut menyebabkan kondisi politik Indonesia dengan Belanda terganggu dan ditambah pula dari beberapa perwira bersenjata mengikuti aksinya dalam pemberontakan tersebut.

Pemberontakan lainnya adalah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) merupakan suatu pemerintahan pemberontak yang berdiri pada 15 Februari 1958. Gerakan mereka bersifat sparatis dan membentuk suatu kabiner dimana duduk beberapa orang tokoh politik dan militer.¹¹ Pemberontakan juga terjadi pada tanggal 5 April 1950 yang dilakukan oleh kesatuan bebas KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal yang mana mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Akantetapi, keadaan ini menyebabkan

⁹ Mastroji, Sejarah, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 60.

¹⁰ A.B. Lopian, *Terminologi Sejarah Indonesia 1945-1950 & 1950-1969*, (Jakarta : Depdikbud, 1996), hlm. 229.

¹¹ *Ibid.*, 154.

ketegangan di kalangan masyarakat akibat terdapat kelompok yang mendukung terbentuknya Negara Federal.

Pemberontakan yang berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia adalah pemberontakan DI/TII. Motif yang dilakukan oleh golongan DI/TII ingin menggagalkan pemilihan umum adalah menjadikan Negara Indonesia agar menjadi sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh dan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII sangat mempengaruhi menjelang pemilihan umum. Hal ini kabinet Wilopo yang belum mampu memulihkan keamanan dari gerombolan DI/TII oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, DI/TII oleh Daud Beureueh di Aceh, DI/TII oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Aksi pemberontakan DI/TII selama pemilihan umum 1955 dilakukan dengan membawa ideologi agama. Pemberontakan tersebut sangat mempengaruhi persiapan pemilihan umum yang sudah direncanakan oleh kabinet tersebut.

Pemulihan keamanan yang belum mampu terselesaikan oleh Negara menyebabkan perpolitikan di Indonesia menjadi carut marut menjelang pemilihan umum. Hal ini menjadikan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah yang dianggap belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Ditambah pula keadaan ekonomi Negara semakin buruk dan ditambah dengan munculnya korupsi yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi merosot tajam.

2. Rencana-Rencana Melaksanakan Pemilihan Umum 1945-1955

Pada awalnya ide untuk melangsungkan pemilihan umum didorong untuk menciptakan demokrasi di Indonesia. Hal ini karena masyarakat Indonesia telah menuntut untuk melaksanakan pemilihan umum.

Pada awalnya rencana untuk mengadakan pemilihan umum secara Nasional telah diumumkan pada 5 Oktober 1945. Tujuan diadakan pemilihan umum itu tidak hanya sekedar untuk memilih tetapi untuk membangun Negara. Akan tetapi, pemilihan wakil-wakil rakyat telah membawakan aspirasi rakyat dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi kemerdekaan untuk memenuhi dan menjaga amanat dari rakyat.

Kabinet pada saat menjelang pemilihan umum 1955 ada beberapa kabinet yang mengalami beberapa formasi

dan pergantian. Pergantian tersebut tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang sulit untuk diatasi. Adapun kabinet saat menjelang pemilihan umum antara lain adalah 1) kabinet Wilopo, 2) kabinet Ali Sastroamijoyo, serta 3) kabinet Burhanudin Harahap.¹²

Akan tetapi, pada kabinet Wilopo mengalami kegagalan untuk mengadakan pemilihan umum. Kegagalan tersebut tidak jauh beda dengan kabinet sebelumnya yaitu Natsir dan Sukiman. Kegagalan untuk mengadakan pemilihan umum tersebut adalah akibat kurang matangnya kegiatan yang direncanakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, Ditambah pula pada saat itu Negara Indonesia pada kabinet Wilopo mengalami defisit uang kas Negara.

Setelah kabinet Wilopo jatuh maka dilanjutkan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I. Berdasarkan program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo I salah satunya adalah menyelenggarakan pemilihan umum, sehingga pada kabinet Ali selama memimpin pemerintahan telah menyanggupi untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu program kerja yang paling utama dalam kabinet ini. Pada tanggal 31 Mei 1954 telah membentuk PPP (Panitia Pemilu Pusat) yang diketahui oleh Hadikusumo dari partai PNI. Setelah pembentukan panitia pemilihan umum pusat telah diputuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955. Namun program kerja tersebut belum bisa terealisasi sepenuhnya.

Setelah kabinet Ali Sastroamijoyo I jatuh, maka Hatta menunjuk Mr. Burhanudin Harahap untuk membentuk kabinet. Adapun kabinet Mr. Burhanudin Harahap mempunyai program kerja sebagai berikut : 1) mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, 2) melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, 3) masalah desentralisasi inflasi dan pemberantasan korupsi, 4) perjuangan pengembalian Irian Barat, dan 5) politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar Negeri.

Berdasarkan program kerja dari kabinet Mr. Burhanudin Harahap, pemilihan umum menjadi program yang dianggap paling utama dan menjadi sorotan utama dalam kinerja kabinet tersebut. Oleh karena itu berhubung sesuai dengan rencana semula pada tanggal 29 September

¹² P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 46.

1955 memilih DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, dalam kabinet sendiri muncul pertantangan karena menghendaki ditundam dengan alasan persiapan belum selesai dan ada juga yang menuntut tetap diadakan pada waktu yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan program kerja kabinet Burhanudin Harahap, pemilihan umum 1955 dapat terlaksana. Walaupun masih banyak permasalahan selama persiapan penyelenggara pemilihan umum, apalagi pemilihan ini dilakukan untuk yang pertama kalinya. Sehingga tidak semua orang dapat memahami betul pesta demokrasi yang akan dilakukan di Negara Indonesia. Penyelenggara tersebut mengalami banyak kendala selama persiapan pemilihan umum, baik dari segi keamanan dan lain-lain. Pelaksanaan persiapan pemilihan umum 1955 tidak dapat dirasakan dengan tenang karena banyak kejadian seperti kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah. Meskipun demikian, pemilihan umum 1955 dapat dilangsungkan walaupun terdapat beberapa kendala yang terjadi didalamnya.

3. Konstelasi Politik : Kekuatan Partai-Partai

Konstelasi politik diartikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih partai untuk bekerjasama dalam koridor tujuan yang sama dengan cara dan peran masing-masing tentunya dengan kesepakatan yang saling menguntungkan pihak yang berkonstelasi. Partai-partai di Indonesia memang banyak sehingga partai politik dikelompokkan menjadi empat aliran setelah adanya Maklumat 3 November 1945, yakni: 1) kelompok partai Islam, 2) kelompok partai nasionalis, 3) kelompok partai sosialis, dan 4) kelompok partai kristen, katolik.

Mengenai pemilihan umum 1955, terdapat penggolongan kelompok partai besar. Hal yang menarik dari pemilihan umum 1955 adalah adanya kesadaran untuk berkompetisi. Saat menjelang pemilihan umum partai politik yang berpengaruh dan memiliki kekuatan adalah partai yang memiliki aliran. Partai yang berpengaruh dalam pemilihan umum yang pertama adalah partai dari kelompok partai Islam. Partai tersebut adalah Partai Masyumi, yang merupakan partai politik yang dulunya dibentuk pada masa pemerintah Jepang. Partai ini memiliki tujuan yang dimiliki umat Islam di Indonesia.

Kekuatan partai Masyumi pada pemilihan umum 1955 partai yang dianggap besar yang merupakan menduduki nomor urut ke dua. Partai politik ini merupakan

sebuah partai politik yang besar yang mempunyai aliran dan basis agama Islam sebagai fondasi dalam mendirikan partai tersebut. Pada umumnya yang dipilih untuk menjadi pemimpin Masyumi adalah para ulama besar pada masanya. Dalam melakukan usahanya partai Masyumi ini menjadi partai yang besar dalam melakukan usahanya untuk memenangkan pemilihan umum 1955. Partai Masyumi merumuskan tujuan partainya dengan cara-cara dan jalan ingin menciptakan Indonesia bercorak agama Islam. Dalam perjuangannya partai Masyumi ini sedikit diragukan dalam membela dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu perbedaan ideologi, walaupun umat Islam secara kuantitatif merupakan mayoritas mutlak dari penduduk Indonesia.¹³

Kekuatan partai Islam seperti Masyumi memiliki basis kekuatan yang besar dan didukung dari umat Islam yang ada di Indonesia. Usaha partai politik dalam menghadapi pemilihan umum dengan cara melakukan proses pembelajaran yang berbasis agama agar tercapai tujuan politiknya.

Usaha partai Masyumi dalam mendulang masa pada pemilihan umum 1955, dilakukan dengan cara mengajak atau melakukan proses perekrutan anggota dari partai Masyumi. Proses perekrutan guna pemilihan umum 1955 dilakukan dengan mengajak bergabung dan sebagian besar mengajak anggota Muhammadiyah. Langkah selanjutnya adalah mereka memaksimalkan kekuatan partai dengan mengadakan perekrutan dari orang-orang pesantren yang ada di Jawa. Oleh karena itu partai ini sangat berpengaruh karena beratas namakan agama sebagai aliran politiknya.

Partai Masyumi memiliki kelompok yang sangat terorganisir dengan baik dan memiliki senjata yang dinamakan laskar Hisbullah dan Sabilillah. Kekuatan Masyumi didukung dengan melakukan kerjasama dengan partai-partai Islam lain untuk memperjuangkan atas nama Islam sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam konstituante. Oleh karena itu pemilihan umum 1955 dijadikan momentum untuk mewujudkan cita-citanya untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam secara merata di Negara Indonesia. Kekuatan Masyumi menjadi nampak ketika organisasi politik ini mampu merumuskan citra Islam dan cita-cita kebangsaan secara modern bagi umat Islam di Indonesia.

¹³ Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 32.

Kedua, adalah kelompok partai yang beraliran Nasionalis. Partai besar tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai pemenang pada pemilihan umum 1955. Kekuatan partai PNI dalam pemilihan umum 1955 tergolong besar. Hal ini dikarenakan PNI memiliki anggota yang berasal dari kalangan orang terpelajar dan berpendidikan. Kekuatan PNI didukung oleh golongan terpelajar sehingga kekuatan partai ini sangat berpengaruh dalam pemilihan umum 1955. Partai ini memiliki tujuan mengumpulkan ide-ide para cendekiawan serta memiliki tujuan mengumpulkan ide-ide para cendekiawan serta memikirkan solusi bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga, adalah kelompok partai sosialis yakni adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Partai ini merupakan partai yang berideologi komunis. Partai ini memiliki kekuatan yang didukung oleh kaum petani dan buruh dengan jalan menompang kemiskinan.

Keempat, adalah kelompok partai yang beraliran kristen, katolik. Partai yang berpengaruh pada saat pemilihan umum adalah Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Partai Parkindo memiliki basis kekuatan yang besar karena partai ini bergerak dengan naungan agama kristen. Dalam melancarkan upaya untuk mendongkrak masa pada pemilihan umum 1955, partai ini melakukan upayanya dengan mendapatkan dukungan di daerah-daerah. Partai Parkindo ini mencari dukungannya di kawasan daerah seperti di daerah Maluku, NTT, Tapanuli, Sulawesi Utara, dan Pedalaman yang ada di Kalimantan.

Salah satu bentuk ancaman yang terjadi pada saat mendekati pemilihan umum adalah dengan melakukan teroro yang merusak psikologis pemilih dengan memberikan cerita-cerita gaib. Dikatakan kepada calon pemilih jika suatu desa tidak memilih partai tertentu maka Desa tersebut akan mengalami celaka. Akibatnya suasana ketakutan saat menjelang pemilihan umum tidak dapat dihindarkan karena adanya teror tersebut.

B. Jalannya Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Berikut ini Jalannya Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955 :

1. Latar Belakang Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Pada awalnya adanya usaha-usaha untuk menggagalkan pemilihan umum dilatarbelakangi oleh waktu penyelenggaraan yang tergolong lama dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan yang dilakukan

memakan waktu yang lama sehingga pemilihan tersebut dianggap hanya sebuah wacana saja dalam agenda pemerintahan. Adanya wacana tersebut menjadikan sebuah kesempatan para partai-partai politik untuk menyusun kekuatan partainya dengan segala cara untuk menjadi salah satu persaingan antar fraksi di beberapa daerah-daerah.

Semenjak ada janji-janji mengenai pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional yang sering dikemukakan oleh berbagai kabinet dengan alasan berbagai hambatan. Hambatan tersebut adalah dari urusan pemerintah yang mendesak dan memunculkan gerakan menentang pemerintah yang mendesak dan memunculkan gerakan menentang pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara.¹⁴

Gerakan yang melatarbelakangi adanya usaha-usaha menggagalkan pemilihan umum salah satunya adalah adanya pemilihan umum yang disiapkan oleh sebuah kabinet lalu dilaksanakan oleh kabinet lainnya. Kabinet yang akan menyelenggarakan pemilihan umum memiliki perbedaan warna politiknya dengan kabinet lain yang akan melaksanakan pemilihan umum. Hal tersebut memicu permasalahan di dalam tubuh kabinet sendiri karena memiliki perspektif yang berbeda untuk melakukan jalannya pemilihan umum.

2. Kronologi Terjadinya Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Peristiwa untuk menggagalkan pemilihan umum yang terjadi sebelum tanggal 29 September 1955, memiliki peristiwa-peristiwa secara kronologis dalam kejadiannya. Penggagalan pemilihan umum dilakukan atas dasar kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Dalam hal ini tentunya banyak kejadian seperti banyaknya kerusakan yang terjadi di daerah-daerah menjelang pemilihan umum. Hal ini ditambah pula masalah logistik atau kebutuhan yang diperlukan dalam persiapan pemungutan suara yang belum dapat terealisasi dengan baik

Berdasarkan jadwal yang ditentukan pada 29 September 1955, Bangsa Indonesia akan melakukan pemungutan suara. Pesta demokrasi yang dilakukan ini ternyata tidak dapat dilakukan secara serentak karena kesulitan komunikasi administrasi serta persoalan-

¹⁴ Lihat "Problem of Election", Indonesia Affairs (Ministry of Information) (April-Mey 1952).

persoalan khusus di daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan, sehingga mustahil menyelenggarakan pemungutan suara pada hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan.¹⁵

Adanya masalah keamanan muncul dugaan bahwa ada orang-orang yang berniat untuk menggagalkan pemilihan umum, maka Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menjaga keamanan di tempat pemungutan suara. Penjagaan ini dilakukan dengan membentuk regu pengamanan atau pembantu polisi yang disebut PKPS (Pembantu Keamanan Pemungutan Suara). Jumlah satu regu pengamanan terdiri dari tiga sampai lima orang untuk setiap tempat pemungutan suara, biasanya diambil dari penjaga keamanan Desa dan terkadang partai-partai yang melakukan penjagaan.

Kronologi adanya usaha kegagalan pemilihan umum 1955, nampak adanya desas-desus yang menggelisahkan di berbagai daerah di Indonesia. Di berbagai daerah desas-desus yang berkembang tidak jelas. Bahkan terdapat dari beberapa daerah di Jawa muncul cerita mengenai penjaja jimar yang menawarkan ramuan-ramuan kekebalan khusus untuk pemilihan umum, ada pedagang yang menimbun barang, dan ada di daerah tempat terpencil penduduk berebut ke rumah gadai. desas-desus yang menyebar ke hampir ke seluruh Jawa adalah peracunan, saat menjelang dan sesudah pemilihan umum anggota Parlemen, bisa dianggap merupakan pantulan situasi psikologis, abnormal yang sama.¹⁶

Kondisi pada hari pemungutan suara muncul rasa takut dikarenakan penduduk Desa di berbagai wilayah percaya bahwa dengan memberikan suara itu merupakan kewajiban dan bagi orang yang tidak memberikan hak suara akan mendapatkan hukuman. Sedangkan, di tempat-tempat yang tidak dilanda Desas-desus seperti itu, pemilih merasa takut dimarahi lurah dan pejabat Desa lainnya kalau tidak datang memberikan suaranya. Ketakutan mereka bertambah dikarenakan mereka takut dimarahi pemimpin-pemimpin partai yang sudah menandatangani mereka

dengan harapan meminyanya untuk memberikan suara dan memilihnya.¹⁷

Peristiwa selama pemilihan umum 1955 tidak terlepas dari banyaknya peristiwa kekacauan yang terjadi. Hal ini jika dihubungkan dengan teori N.J. Smelser berdasarkan indikatornya mengenai mobilisasi massa untuk beraksi, yakni adanya suatu tindakan nyata dari massa dan mengorganisasi diri mereka untuk bertindak. Bentuk mobilisasi tersebut adalah berupa tindakan nyata berupa kekacauan selama pemilihan umum yang merupakan salah satu upaya untuk menggagalkan pemilihan umum 1955. Hal ini terbukti pada tanggal 4 Oktober 1955, surat kabar *Merdeka* yang memberitakan dan membuktikan adanya gerombolan DI/TII berusaha mengacau pemilihan umum 4 anggota tentara dan satu anggota PPS gugur. Berikut adalah cuplikan beritanya:

Adanya informasi yang diperoleh di Makassar, 2 Oktober. Empat anggota tentara dan seorang anggota PPS gugur, seseorang anggota tentara lainnya hilang dan seorang luka-luka, ketika gerombolan DI/TII menyekat sebuah mobil tentara 4 Km dari Enrekang di jalan ke jurusan Kalosi pada tanggal 29 September jl., demikian interlokal koresponden "Antara" dari Pare-Pare.¹⁸

Adanya informasi peristiwa yang terjadi, ternyata turut menderita luka-luka supir mobil dan seorang anak. Mobil pekerjaan umum yang ditumpangi oleh korban tersebut terbakar oleh gerombolan. Sebenarnya anggota-anggota tentara tersebut telah bermaksud untuk mengambil surat-surat suara yang ada di lokasi.

Ada faktor eksternal dalam usaha kegagalan pemilihan umum terjadi adanya gerombolan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai macam kekacauan. Gerombolan ini telah berhasil menewaskan lima orang tentara dan petugas setempat pada saat tanggal 29 September 1955. Selain itu, mereka melakukan penculikan bahkan sempat melakukan pembakaran di beberapa tempat pemungutan suara sebagai lokasi sasaran gerombolan yang dipimpin Kahar Muzakar tersebut.

Gerombolan yang di komando oleh Kahar Muzakar selain melakukan pembunuhan, penculikan, dan pembakaran di tempat-tempat pemungutan suara ternyata juga melakukan pencurian surat suara dan Kotak suara di daerah Pare-Pare, Makassar, dan Donggala. Adanya aksi tersebut termasuk dalam kategori adanya niatan untuk

¹⁵ Lihat berita Negara, 1 Maret 1956 dan pidato Ketua Panitia Pemulihan Indonesia pada Rapat Umum Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Parlemen, 1 Maret 1956.

¹⁶ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Indonesia, 1999), hlm. 72.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁸ *Merdeka*, 4 Oktober 1955.

menggagalkan pemilihan umum. Aksi pencurian surat suara dan kotak suara tersebut tentunya berdampak pada tingkat partisipasi menjadi rendah di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.¹⁹ Adanya aksi tersebut termasuk dalam kategori adanya niatan untuk menggagalkan pemilihan umum. Aksi pencurian surat suara dan kotak suara tersebut tentunya berdampak pada tingkat partisipasi menjadi rendah di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara.²⁰

3. Bentuk-Bentuk Penggagalan dalam Pemilihan Umum 1955

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya ada kecurangan dalam pemilihan umum merupakan bentuk-bentuk upaya kegagalan pemilihan umum 1955. Pada tanggal 21 Oktober 1955, surat kabar *Merdeka* memuat pernyataan adanya bentuk kecurangan pemilihan umum di Makassar. Berikut adalah cuplikan beritanya :

12 Partai dan organisasi di Makassar dalam suatu pernyataan bersama menyatakan, bahwa mereka tidak dapat menerima hasil-hasil pemungutan suara dalam daerah Kotabesar Makassar yang telah berlaku pada tanggal 29 September 1955.²¹

Adanya informasi yang disampaikan oleh partai dan organisasi di Makassar sebagai alasan yang dikemukakan bahwasannya hasil pemilihan umum dari daerah Kotabesar di Makassar disimpan pada ruangan ketua PP Kabupaten Kota besar Makassar selama 2 malam dan dalam waktu tersebut Kotak hasil pemungutan suara telah dibuka dan disortir oleh tangan yang dikatakannya dalam pernyataan itu tidak berhak sebelum disampaikan kepada PPD XII. Bahkan ditekankan, bahwa dalam kejadian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum peraturan-peraturan pemerintah, dan instruksi Panitia Pemilihan Indonesia.

Adapun isi pernyataan tersebut adalah yang ditandatangani oleh wakil-wakil IPKI cabang Makassar. Persatuan Indonesia Raya yang ditandatangani oleh Hazarin, Partai Rakyat Nasional, Partai Nasional Indonesia Gerakan Wanita Indonesia, Gerakan Buruh dan Tani, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi, Gerakan

Pembela Pancasila, Persatuan Tani Nasional Indonesia, Badan Perjuangan Buruh, dan Biro Perjuangan Pembangunan Republik Indonesia kesemuanya cabang Makassar.

Peristiwa-peristiwa mengenai beredarnya masalah kecurangan dalam pemilihan umum 1955 tidak dapat terbedung. Berdasarkan surat kabar *Indonesia Raya*, pada tanggal 7 Oktober 1955 terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum. Berikut adalah cuplikannya :

Kecurangan dalam pemilihan umum terbagkar di Kudus dan Cilacap dan sudah mulai diterima laporan-laporan tentang terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dan perhitungan surat-surat suara.²²

Berdasarkan berita tersebut bentuk upaya kegagalan dengan jalan kecurangan-kecurangan, hal ini tentunya tidak terlepas dari oknum yang tidak bertanggung jawab guna berniat menggagalkan pemilihan umum. Seperti yang diberitakan dalam surat kabar di atas, pemilihan umum yang terjadi di Kudus pada saat berlangsung terhitung telah terjadi tiga pelanggaran, yaitu pertama di Desa Pajaman, seorang Lurah telah mencoba untuk memberikan kartu memilih yang tidak sah kepada tujuh orang, padahal ketujuh orang tersebut belum terdaftar. Terjadi pula di Desa Damaran, dua orang telah menggunakan kartu memilih untuk untuk menjalankan pemungutan suara milik orang lain. Sedangkan di Desa Getas Pedjaten menyebabkan batalnya pemilihan umum 1955, oleh karena seorang yang tidak berhak, bertindak sebagai ketua panitia pemungutan suara.

Kejadian yang lain juga terjadi di Cirebon, yang mana di daerah ini diduga ada mandor-mandor yang menjadi tengkulak di golongan tertentu. Berdasarkan surat kabar *Pikiran Rakyat*, 14 Oktober 1955 memuat pernyataan pemilihan umum di Cirebon akan diulangi karena adanya para mandor-mandor yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum. Berikut cuplikan beritanya :

“Dari Cirebon menyatakan, bahwa jalannya pemilihan umum di beberapa daerah Karesidenan ternyata telah mengecewakan dan merugikan salah satu golongan, sehingga ada kemungkinan persoalannya akan dikemukakan kepada PPI lewat Jaksa Agung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”²³

¹⁹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 63

²⁰ *Merdeka*, 21 Oktober 1955.

²¹ *Merdeka*, 21 Oktober 1955.

²² *Indonesia Raya*, 7 Oktober 1955.

²³ *Pikiran Rakyat*, 14 Oktober 1955.

Mengingat kondisi tersebut menyebabkan kekecewaan di beberapa daerah di Cirebon, yang telah diperoleh keterangan dari beberapa pemilih di daerah tersebut yang ketika sebelum pemungutan suara dan sampai jalannya pemilihan umum pada waktu yang telah ditentukan. Adanya suatu kecurangan yang sebelumnya golongan tertentu telah melakukan pemberian uang sebagai hutang kepada orang-orang, dengan maksud agar supaya orang-orang tersebut dapat memberikan suaranya. Pemberian uang tersebut dilakukan untuk menarik massa dengan iming-iming apabila nanti ternyata memperoleh suatu kemenangan maka pemberian uang yang disebut hutang tersebut dianggap lunas tanpa harus membayarnya kembali.

Adanya mandor-mandor yang telah melakukan tengkulak suara yang dilakukan di daerah Cirebon, ternyata ada satu golongan yang memenangkan dan dianggap tidak wajar atau tidak masuk akal. Hal ini diketahui karena adanya tertukarnya lembar kertas 50 kartu suara dengan Jawa Tengah. Akantetapi, mereka tidak diperkenankan dan terus mempergunakan hak pilihnya. Jumlah yang banyak sekali yang semula terdapat dalam daftar induk ternyata hilang dalam daftar dan menyebabkan tidak ikut memilih dalam pemilihan umum tahun 1955.

Dengan demikian, berdasarkan laporan mengenai bentuk upaya kegagalan dalam pemilihan umum memang terjadi di beberapa daerah-daerah di Indonesia. Ternyata memang ada gerombolan-gerombolan atau golongan yang ingin mengacaukan pemilihan umum. Upaya jalannya kegagalan pemilihan umum yang dilakukan oleh gerombolan dengan cara menakut-nakuti rakyat supaya tidak datang memilih ke lokasi pemungutan suara, karena mereka takut kalau suara rakyat yang tidak mereka ketahui jatuh kepada golongan yang bukan termasuk golongannya. Padahal, jikalau pada saat memilihpun nantinya tidak ada yang tahu siapa atau daftar partai yang mana yang sudah dipilih.

C. Reaksi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Adanya Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Berikut ini Reaksi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Adanya Usaha Menggagalkan Pemilihan Umum 1955 :

1. Reaksi Pemerintah dalam Menghadapi Adanya Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan umum 1955 tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraannya. Permasalahan tersebut tentunya akan menimbulkan reaksi dari kalangan pemerintah dan masyarakat tentunya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi harus diatasi guna kelancaran pemilihan umum.

Reaksi pemerintah saat adanya usaha kegagalan pemilihan umum 1955, adalah pemerintah melakukan upaya pembersihan dan konsolidasi yang dilakukan dikalangan tentara sendiri saat menjelang pemilihan umum. Hal ini jika dikaitkan dengan teori kerusuhan massa dari N.J. Smelser yang berdasarkan indikatornya mengenai kontrol sosial, yang nampak adalah yakni kontrol sosial yang dilakukan oleh kemampuan aparat keamanan dalam menghadapi kerusuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan dari surat kabar *Sinpo*, 7 Juni 1955 telah memberitakan adanya pembersihan di kalangan tentara pada saat menjelang pemilihan umum. Berikut cuplikan beritanya :

Komandan KKMB Jakarta Letnan Kolonel Akil dalam konferensi persnya yang menerangkan bahwa untuk menghadapi pemilihan umum, dianggap penting sekali untuk segera menyelesaikan keamanan rutin di Jakarta, supaya keamanan selama pemilihan umum benar-benar dapat terjamin. Kalau masalah keamanan rutin belum diselesaikan maka keadaan sulit akan timbul dalam pemilihan umum nanti.²⁴

Berdasarkan pemberitaan tersebut menyebabkan semua alat-alat negara harus sudah disiapkan terlebih dahulu supaya sanggup menghadapi segala keadaan dengan sepenuhnya. Dalam hal yang dilakukan seperti pembersihan tersebut letnan Kolonel Akil menegaskan, di kalangan ketentaraan sendiri perlu diadakan pembersihan dan konsolidasi. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak KMKBDR yang perlu diperhatikan karena mereka ternyata tidak sedikit yang melakukan perbuatan yang berada di luar kompetensinya dengan menggunakan surat-surat keterangan yang ada pada mereka, misalnya menodong, menggertak, dan lain sebagainya.

Upaya pemerintah dengan melakukan pembersihan, seperti KMKBDR telah mengeluarkan pengumuman, disampingnya sangat diharapkan bantuan rakyat untuk bersama-sama memberantas anasir-anasir tersebut, dengan jalan melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan-perbuatan mereka selama menjelang pemilihan

²⁴ *Sinpo*, 7 Juni 1955.

umum 1955. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri jikalau mungkin orang merasa takut untuk melaporkan secara lisan, maka mereka diberikan kesempatan untuk melaporkannya dengan mengirim surat. Pengumuman KMKBDR tersebut adalah :

1. Di daerah kota besar Jakarta terdapat orang-orang bukan militer yang mengaku atau menonjolkan dirinya sebagai pembantu dari K.M.K.B Jakarta.
2. Diantara mereka terdapat orang-orang yang berbuat baik terhadap rakyat dan atau menggunakan nama K.M.K.B. Jakarta untuk kepentingan sendiri.
3. Untuk menjadi nama baik K.M.K.B. Jakarta, dan untuk mencegah adanya pembantu-pembantu palsu, maka mulai tanggal 7 Juni 1955 mengenai pembantu-pembantu itu, diadakan sebagai berikut :
 - a. Seorang pembantu, baru sah menjadi pembantunya, kalau ia memegang surat kenyataan, yang memakai pas foto si pemegang dan yang ditanda tangani oleh Komandan K.M.K.B. Jakarta sendiri dengan dibubuhi tiap Komandan.
 - b. Seorang pembantu hanya diperkenankan memegang senjata api, kalau ia disampingnya surat tanda kenyataan tersebut, mempunyai surat senjata api sementara yang juga ditandatangani oleh Komandan K.M.K.B Jakarta.
4. Orang-orang bukan militer juga mengaku dirinya pembantu K.M.K.B Jakarta dan atau memegang K.M.K.B Jakarta dengan tidak mempunyai surat-surat seperti tersebut dalam pun 3a dan b, adalah tidak sah (palsu).
5. Kepada khalayak ramai diminta bantuannya, kalau terdapat pembantu-pembantu palsu, supaya dengan segera melaporkannya secara lisan atau surat kepada salah satu dari pada yang tersebut dibawah ini :
 - a. Komandan K.M.K.B Jakarta, dengan perantaraan pejabat piket K.M.K.B Jakarta, Lapangan Banteng Barat 18, atau di alamatkan kepada kotak pos No. 2343 Jakarta.
 - b. Kepala Polisi Jakarta dengan perantaraan Kantor Besar Polisi Jakarta, Jalan Merdeka Barat.
 - c. Pos Polisi Militer yang terdekat.

Bentuk kontrol sosial berdasarkan teori N.J. Smelser yang telah dijelaskan di atas merupakan salah satu bentuk kemampuan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam mengendalikan situasi selama jalannya pemilihan umum. Banyaknya kerusuhan di beberapa daerah menyebabkan reaksi pemerintah dengan melakukan pemantauan dan

pengamanan selama jalannya pemilihan umum 1955 dari oknum-oknum yang berniat mengacaukannya.

2. Reaksi Masyarakat dalam Menghadapi Adanya Usaha Penggagalan Pemilihan Umum 1955

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 sebenarnya masyarakat mengharapkan pemerintah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Banyaknya peristiwa kekacauan saat pemilihan umum menyebabkan masyarakat tidak begitu percaya terhadap pemerintah karena banyak kekacauan yang ada. Berdasarkan laporan telah terjadi kekacauan menjelang pemilihan umum, yakni adanya ketua Masyumi Sumatra Utara dikeroyok gerombolan di Medan. Berdasarkan pemberitaan di surat kabar *Indonesia Raya*, 3 Maret 1955 memberitakan mengenai. Berikut cuplikan beritanya :

Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari jam 7.50 pagi, ketua Masyumi Sumatra Utara, Udin Sjamsuddin dan calon Masyumi untuk DPR, telah diserang dan keroyok dengan tiba-tiba oleh gerombolan orang-orang di Gang Waslijah jalan Serdang, Medan. Serangan dan pengeroyokan ini dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, terbukti dengan cara, kedatangan dan kembalinya gerombolan ini, diangkat dengan sebuah mobil gerobak yang disediakan lebih dahulu dan nomer BK-nya ditutup, demikian menurut harian Lembaga Medan.²⁵

Berdasarkan kejadian kekacauan tersebut menyebabkan reaksi masyarakat khususnya kaum muslimin tidak dapat diam. Reaksi kaum muslimin nampak dengan munculnya ratusan kaum muslimin telah membanjiri rumah Udin Syamsuddin dan ketika Syamsuddin menyampaikan berita ini di kantor polisi, di depan kantor polisi telah berkerumun ratusan orang pemuda-pemuda Islam, anggota Masyumi, Al-Washlijah dan sebagainya. Adanya aksi tersebut pihak kepolisian terpaksa meminta kepada Udin untuk menenangkan keadaan, jangan sampai anak-anaknya yang banyak itu mengambil keputusan sendiri, permintaan mana yang harus dipenuhi oleh Udin Syamsuddin.

Adapun reaksi pernyataan oleh Masyumi Sumatra Utara, berhubung dengan kejadian itu Masyumi wilayah Sumatra Utara serta organisasi-organisasi istimewa dari badan otonomnya telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan antara lain, bahwa perbuatan jahanam adalah tentetan daripada fitnahan-fitnahan caci makian dan

²⁵ *Indonesia Raya*, 3 Maret 1955.

intimidasi yang selama ini dilakukan oleh PKI dalam manifest pemilihan umum PKI dan sebagainya.

Berdasarkan surat kabar *Berita Indonesia*, 6 September 1955 mengenai pemberitaan masalah adanya pemerintah Burhanudin Harahap akan menunda 2 bulan pemilihan umum. Reaksi masyarakat mengenai hal ini adalah masyarakat mengalami kebingungan. Tetapi yang jelas menimbulkan pertanyaan adalah apakah sebabnya partai-partai NU, PSII dan lainnya tidak melihat bahwa dengan menyetujui cara untuk menunda pemilihan umum maka mereka akan kehilangan konsekwensinya. Dengan demikian akan menyebabkan kebingungan masyarakat terhadap diri mereka sendiri.

Terdapat laporan-laporan mengenai intimidasi pada saat pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Intimidasi tersebut terdapat terjadi di dua tempat. Pertama, banyak masyarakat atau calon pemilih yang merasa ditekan oleh partai politik seperti Masyumi diberbagai tempat di Aceh dan Jawa Barat dimana terdapat kekuatan Darul Islam yang memang harus diperhitungkan. Kedua, di berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terjadi intimidasi banyak sekali dan luas, yang dilakukan oleh lurah-lurah PNI dan pembantu mereka, dan di tingkat yang lebih rendah oleh orang-orang Komunis penjaga keamanan desa.²⁶

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum 1955 merupakan salah satu wujud dari Negara demokrasi yang diselenggarakan pemerintah guna untuk kepentingan bersama. Penyelenggaraan pemilihan umum diwarnai permasalahan pengunduran waktu dalam penyelenggaraannya Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Republik Indonesia berlangsung dalam dua tahap, yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum menarik perhatian oleh partai-partai politik, yang mana pemilihan ini diikuti oleh partai-partai yang akan menyusun kekuatan di pemerintahan. Perbedaan ideologi partai membuat penyelenggaraan pemilihan umum menjadi bergejolak akibat semakin panasnya bahkan muncul pertikaian yang

terjadi pada partai-partai politik atau yang disebut dengan persaingan antar fraksi.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dinilai lama menjadi masyarakat tidak begitu sepenuhnya percaya kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ditambah lagi pemilihan umum yang telah disiapkan tersebut merupakan kabinet yang memiliki perbedaan warna politiknya. Sehingga situasi ini menjadi kesempatan beberapa oknum yang berniat untuk menggagalkan pemilihan umum yang dilakukan di beberapa daerah.

Upaya kegagalan pemilihan umum dilakukan dalam bentuk-bentuk pergolakan yang terjadi di beberapa daerah. Upaya kegagalan tersebut dilakukan dengan cara intimidasi. Upaya kegagalan dilakukan dengan aksi brutal dengan membunuh beberapa anggota PPS dan tentara guna mengganggu keamanan saat menjelang pemilihan umum. Hal ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan pemilihan umum mengalami penundaan dan bahkan tidak dapat dilakukan secara serentak secara Nasional.

Adanya usaha untuk menggagalkan pemilihan umum menimbulkan reaksi terhadap pemerintah yakni dengan melakukan upaya penumpasan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau pemilihan umum yang ada di daerah-daerah. Penumpasan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pemilihan umum atau yang berniat untuk menggagalkan jalannya pemilihan umum. Kemudian, reaksi masyarakat adanya usaha menggagalkan pemilihan umum adalah masyarakat dilanda kebingungan karena banyaknya pertikaian di daerah-daerah. Sehingga masyarakat dalam penanganannya melakukan pengamanan dan menambah penerangan agar terhindar gerombolan yang berniat mengacaukan pemilihan umum.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemilihan umum 1955 memang terselenggara namun terdapat catatan merah mengenai penyelenggaraannya. Hal ini karena masalah waktu penyelenggaraan yang terlalu lama dan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi baik di jajaran panitia maupun oknum yang ingin menggagalkan jalannya pemilihan umum.

A. Saran

Pemilihan umum 1955 merupakan pesta demokrasi yang pertama bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi peristiwa yang dianggap penting karena menjadi tonggak

²⁶ Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 68.

sejarah diadakannya pemilihan umum. Pada saat pemilihan umum memang terdapat usaha menggagalkan pemilihan umum yang dilakukan oleh para gerombolan sehingga pelaksanaan pemilihan umum memakan waktu yang lama bahkan tidak serentak. Oleh karena itu, kita hendaknya mengambil hikmah dari pelajaran yang ada, supaya dalam pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya dapat dilakukan secara matang dengan pengamanan yang baik dan kondisi Negara dalam keadaan yang stabil agar tercipta pemilihan umum yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dokumen Kearsipan

Arsip Sekretaris Negara KPM 1950-1959.

B. Sumber Surat Kabar

Berita Indonesia, 6 September 1955.

Indonesia Raya, 3 Maret 1955.

Indonesia Raya, 7 Oktober 1955.

Merdeka, 4 Oktober 1955.

Merdeka, 21 Oktober 1955.

Pikiran Rakyat, 14 Oktober 1955.

Sinpo, 7 Juni 1955.

C. Sumber Buku.

A.B. Lopian, dkk. 1996. *Terminologi Sejarah Indonesia 1945-1950 & 1950-1969*. Jakarta : Cv Defit Karya.

Ahmad Syafii Maarif. 1966. *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1950-1965)*. Jakarta : Gema Insani Press.

C.S.T. Kansil (b). 1974. *Inti pengetahuan Pemilihan Umum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Faisal Siagian. 2002. *Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.

Herbert Feith. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta : Kepustakaan Populer Indonesia.

Sihbudi Riza dan Moch Nurhasim Ed. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Grasindo.

Matroji. 2002. *Sejarah*. Jakarta : Erlangga.

P.K. Poerwantana, 1994. *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah potret pasang-surut*. Jakarta : CV. Rajawali.

Syafii Maarif. 1988. *Islam dan Politik di Indonesia..*Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press.

D. Sumber Jurnal Online

Baskara T. Wardaya. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004. Yogyakarta. (Online). Diakses tanggal 20 Mei 2016.